



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 11 Juni 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi pelaksanaan program pertanahan
Ketua Rapat	: <b>Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.</b> <b>/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 21 (dua puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri ATR/BPN RI

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program pertanahan, pada hari Selasa, 11 Juni 2024, dibuka pukul 14.31 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program pertanahan, sebagai berikut:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah berhasil mendaftarkan 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 juta bidang

tanah di antaranya sudah bersertipikat; atau mencapai 94,4% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024; dan mencapai 89% dari target PTSL keseluruhan, sebesar 126 juta bidang tanah, pada tahun 2025.

2. Terkait penerapan sertipikat elektronik secara masif. Hingga Februari 2024, layanan kantor elektronik baru dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kementerian ATR/BPN berhasil menambah hingga 114 Kabupaten/Kota atau penambahan sebesar kurang lebih 1.100 persen. Dalam 100 hari kerja, terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat, hingga mencapai 62.753 sertipikat.
3. Kementerian ATR/BPN sedang merevisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan *carbon trading*. Kementerian ATR/BPN melakukan akselerasi dengan merevisi PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Hal ini untuk mengakomodir pengaturan terkait pemberian Hak Atas Tanah untuk lahan, dengan peruntukan jasa lingkungan; melalui perluasan pengertian “usaha pertanian” dalam pemberian HGU, dengan mengakomodir tanaman yang dapat menyerap karbon. Melalui revisi PP ini, akan memungkinkan bagi masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk terlibat dalam perdagangan karbon. Selain merevisi PP, kami juga terlibat dalam rancangan Perpres Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, yang mengatur materi carbon capture/carbon storage pada Pemberian Hak Ruang Bawah Tanah (RBT). Naskah dari kedua peraturan sudah mencapai final draft dan selanjutnya akan masuk pada tahap pengesahan. Dengan adanya pengaturan yang mendukung kegiatan Carbon Trading, kita mempersiapkan kepastian hukum bagi para kontributor penyerap karbon sekaligus bagi masyarakat.
4. Kementerian ATR/BPN menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian tanah dalam Pembangunan IKN. Dari target 21 paket pengadaan tanah, hingga Februari 2024, telah dilakukan pengadaan tanah sebanyak 8 paket. Dalam 100 hari kerja, Kementerian ATR/BPN telah berhasil melakukan penambahan 4 paket pengadaan tanah, meliputi infrastruktur IKN tahap I, sistem pengelolaan air minum, jalan *shortcut* Pasar Sepaku, dan jalan tol akses menuju IKN. Sehingga, total keseluruhan pengadaan tanah yang sudah selesai berjumlah 12 paket. Sementara itu, 9 paket lainnya masih dalam proses pengadaan. Adapun, terkait program konsolidasi tanah, selama masa 100 hari kerja, Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan 55 sertipikat untuk korban pasca gempa bumi Kabupaten Cianjur, 195 sertipikat untuk optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Bantul, 115 sertipikat untuk penataan

kawasan kumuh di Kota Kendari, 737 sertipikat untuk penataan bencana likuifaksi dan penanganan konflik pertanahan di Kota Palu, dan 20 sertipikat di Pekanbaru. Atas arahan Bapak Presiden, Kementerian ATR/BPN juga membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk merelokasi warga korban erupsi Gunung Ruang, dengan mengadakan tanah relokasi seluas 10 hektar di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu, dalam 100 hari kerja, Kementerian ATR/BPN juga ikut memastikan suksesnya proyek strategis nasional, termasuk lima infrastruktur yang telah diresmikan penggunaannya, yaitu: Makassar New Port, Bendungan Lolak, Bendungan Ame Roro Tahap I, Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, dan Bendungan Sepaku Semoi Tahap I. Kemudian, pada bidang pengendalian dan penertiban tanah, dalam 100 hari kerja, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan penetapan 1.930 hektar tanah terlantar, atau sebesar 55% dari target 3.500 hektar pada tahun 2024. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga telah menetapkan tanah cadangan umum negara, seluas 4.323 hektar, atau sebesar 86% dari total target 5.000 hektar pada tahun 2024.

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program pertanahan, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) untuk segera merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk meminimalisir gerakan mafia tanah.
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN mengkaji ulang kebijakan sertifikat elektronik mengingat tingginya ketergantungan kepada teknologi yang membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek seperti: anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan keamanan.
3. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagai upaya meminimalisir permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam bidang pertanahan, kawasan hutan, maupun pertambangan.
4. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang



menjadi acuan penerbitan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

5. Terhadap mafia tanah, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan kasus mafia tanah dengan respon cepat terhadap laporan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, serta melakukan pembenahan secara menyeluruh di Kementerian ATR/BPN
6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk memberikan bantuan hukum maksimal kepada para pegawai di Kementerian ATR/BPN ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

Jakarta, 11 Juni 2024  
KETUA RAPAT



Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.  
A-142